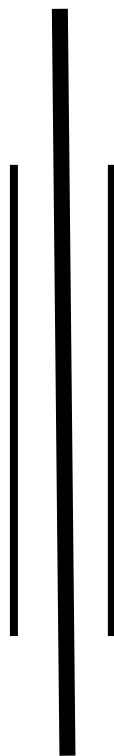


**RENCANA KERJA
(RENJA)
TAHUN 2025**



**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
STATISTIK KOTA BANDA ACEH**



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
STATISTIK

Jl. ABU LAM U NO 7 BANDA ACEH (KOMPLEK BALAI KOTA), Telp/Fax.- KODE POS 23242

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KOTA BANDA ACEH

NOMOR: 065 / 342.1 / SK / 2024

TENTANG
RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
STATISTIK KOTA BANDA ACEH TAHUN 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KOTA BANDA ACEH

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - c. bahwa salah satu tugas pokok Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi, informatika dan statistik;
 - d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b dan c maka perlu ditetapkan sebuah Keputusan mengenai penetapan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh Tahun 2025.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor (Drt) 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
16. Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Banda Aceh 2007-2027;
21. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh;
22. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 54 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh;
23. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.

M E M U T U S K A N

Menetapkan:

- KESATU : Penetapan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh Tahun 2025;
- KEDUA : Pemberlakuan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun 2025 sebagai Acuan Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDA ACEH

PADA TANGGAL : 17 Juli 2024

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
STATISTIK KOTA BANDA ACEH**



Alizar, S.Ag., M.Hum
Pembina Utama Muda /
NIP. 19691117 200112 1 002

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan sehingga dapat menunaikan perintah-Nya serta diberikan kesempatan melaksanakan tugas sebagai abdi negara untuk melayani masyarakat Kota Banda Aceh. Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan umat manusia.

Alhamdulillah dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfo) Kota Banda Aceh Tahun 2025 dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu yang diberikan. Renja Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan berorientasi hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 tahun sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Diskominfo Kota Banda Aceh. Renja merupakan perbaikan terhadap dokumen Rancangan Renja dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategik serta merupakan dokumen perencanaan yang memiliki konsistensi perencanaan dan pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan Kota Banda Aceh di bidang Teknologi, Informatika dan Komunikasi serta Statistik.

Dokumen Renja 2025 disusun berdasarkan penyempurnaan dokumen Rancangan Renja yang telah disusun terlebih dahulu sebagai pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan tahunan sesuai dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Diskominfo di bidang Teknologi, Informatika dan Komunikasi, Statistik dan Persandian serta memberikan gambaran dan arah yang jelas dalam pemanfaatan optimal sumber daya yang dimiliki untuk memenuhi tuntutan perkembangan lingkungan strategis yang dinamis.

Renja Diskominfo Kota Banda Aceh Tahun 2025 ini diharapkan bisa bermanfaat bagi berbagai pihak yang menggunakan, baik Pemerintah Kota, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh maupun masyarakat pada umumnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DISKOMINFOTIK TAHUN 2023	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Diskominfo Tahun 2023 dan Capaian Rencana Strategis Diskominfo	8
2.1.1.Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan .	16
2.1.2.Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan .	18
2.1.3.Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan	18
2.1.4.Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah	18
2.1.5.Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut	19
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Diskominfo.....	20
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Diskominfo	24
2.3.1. Tingkat Kinerja Pelayanan Diskominfo.....	24

2.3.2. Permasalahan dan Hambatan	25
2.3.3. Dampaknya terhadap pencapaian prioritas pembangunan, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals)	26
2.3.4. Tantangan dan Peluang	26
2.3.5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti	27
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	28
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ...	40
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DISKOMINFOTIK	
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	42
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Diskominfo	43
3.3. Program dan Kegiatan	45
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DISKOMINFOTIK ...	55
BAB V PENUTUP	64

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa "Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah", Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Tahunan pada level Perangkat Daerah dimana Renja disusun melalui proses penjabaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Banda Aceh, Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (RPD) Diskominfo tahun 2023-2026. Renja berisikan informasi dan panduan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dikerjakan oleh Perangkat Daerah dalam periode satu tahun. Renja dilengkapi dengan kerangka anggaran dan regulasi yang berlaku serta memberikan gambaran mengenai tujuan, sasaran dan target kinerja, indikator kinerja, lokasi, target capaian kinerja, kebutuhan dana, sumber dana dan kelompok sasaran serta bagaimana pengorganisasian program, kegiatan dan sub kegiatan pelayanan perangkat daerah sesuai dengan tupoksinya.

Penyusunan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfo) Kota Banda Aceh dimulai dengan melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan pemangku kepentingan terkait dan tahapan berikutnya adalah persiapan penyusunan, menyusun Rancangan Awal (Ranwal) Renja, menyusun Rancangan Renja, Melaksanakan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, Perumusan rancangan akhir dan melakukan penetapan.

Adapun keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah (RKPD) dengan dokumen perencanaan lainnya adalah bahwa Renja merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah yang merupakan penjabaran dari dokumen rencana perangkat daerah 5 (lima) tahunan atau disebut Renstra Perangkat Daerah. Sedangkan renja mengacu pada dokumen RKPD yang selanjutnya RKPD tersebut akan dijadikan acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran serta Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) pada tahun yang direncanakan.

Prinsip Penyusunan Renja Diskominfo Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Substansi Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik merupakan penyempurnaan dari Rancangan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
2. Program, kegiatan dan sub kegiatan dirincikan menurut sumber pendanaan yang diusulkan serta memuat tolak ukur kinerja keluaran, target capaian program, kegiatan dan sub kegiatan, target keluaran dan total dana yang diperlukan;
3. Berpedoman pada Renstra Diskominfo tahun 2023-2026 dimana hal ini bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang telah disusun;
4. Berpedoman pada hasil evaluasi Renja Diskominfo tahun lalu dan Renja Diskominfo tahun berjalan, yang bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan alternatif dan/atau baru dapat dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Diskominfo Kota Banda Aceh tahun 2023-2026.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam Penyusunan Renja Diskominfo Kota Banda Aceh tahun 2024 adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 (sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- k. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- l. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Banda Aceh 2007-2027;
- m. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh;
- n. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 54 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh;
- o. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja Diskominfo Kota Banda Aceh Tahun 2025 dimaksudkan sebagai acuan di dalam menentukan prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan serta anggaran yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.

Tujuan penyusunan Renja Diskominfo Kota Banda Aceh Tahun 2025 adalah:

- 1. Mereview capaian pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Diskominfo Kota Banda Aceh sampai dengan tahun Tahun 2025 dan menganalisis kesesuaiannya dengan target Renstra;
- 2. Menetapkan program, kegiatan dan sub kegiatan Diskominfo Kota Banda Aceh Tahun 2025, dan
- 3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta evaluasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rancangan Renja Diskominfo Kota Banda Aceh Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bagian ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Diskominfo Tahun 2023 dan Capaian Renstra Diskominfo

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Diskominfo Tahun 2023 (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun Tahun 2024 (tahun n-1). Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Diskominfo berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Diskominfo tahun-tahun sebelumnya

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Diskominfo berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018, tentang Standar Pelayanan Minimal, maupun terhadap IKK sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi Diskominfo serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Diskominfo dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Diskominfo, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Diskominfo, dampaknya terhadap capaian prioritas pembangunan daerah, capaian

program nasional/internasional, seperti SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*), tantangan dan peluang serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun yang direncanakan

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan dengan cara membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan beserta dengan penjelasan alasan kenapa hal tersebut dilakukan, penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dilakukan beserta catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berisikan uraian hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Kabupaten/Kota maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota. Dijelaskan juga mekanisme penerimaan usulan program/kegiatan dari pemangku kepentingan tersebut, kesesuaian usulan tersebut dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN DISKOMINFOTIK

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Diskominfo

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Diskominfo yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Diskominfo

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan, rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan serta penjelasan jika rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal Diskominfo, baik jenis program, kegiatan dan sub kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DISKOMINFOTIK

Bab ini berisi tentang rencana kerja Diskominfo tahun 2025 dengan menyertai penjelasan sumber pendanaannya.

BAB V. PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMASI DAN STATISTIK (DISKOMINFOTIK) TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Diskominfo
Tahun 2022 dan Capaian Rencana Strategis Diskominfo

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi apakah capaian kinerja sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan sehingga dapat diketahui efisiensi dan efektivitas kinerja serta kendala dan hambatan apa saja yang ditemui di dalam pelaksanaannya untuk dijadikan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan pada tahun-tahun mendatang.

Evaluasi Renja Diskominfo tahun 2025 dilakukan dengan cara memperhatikan capaian pelaksanaan kinerja pada Renja di tahun n-2 atau tahun 2023. Sementara itu target dan perkiraan capaian kinerja pada tahun 2023 dapat ditetapkan dengan mengacu kepada Renstra periode 2023-2026 yang merujuk kepada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Banda Aceh tahun 2023-2026. Rincian rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja Diskominfo Kota Banda Aceh Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.1..

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh sampai dengan Tahun 2024

KODE					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan , Sub Kegiatan s/d, dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2024	
										Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
2					Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar								32,23		28,00
2	16				Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika								96,69		34,00
2	16	01			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah	100	%	0	100	0	96,64	100	34,55	34,55
2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	100	%	0	100	0	0	100	0,00	0,00
2	16	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	Dokumen	0	5	0	0	0	0	0,00

2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%	0	100	0	97,49	100	48,96	48,96
2	16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	132	Orang/Bulan	0	33	33	100,78	33	66	50,00
2	16	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	Dokumen	0	12	11	89,42	12	23	47,92
2	16	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	%	0	100	0	0	100	25,00	25,00
2	16	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	240	Paket	0	60	0	0	60	60	25,00
2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	0	100	0	90,14	100	49,17	49,17
2	16	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	24	Paket	0	6	6	100	6	12	50,00
2	16	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	28	Paket	0	7	7	100	7	14	50,00
2	16	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80	Laporan	0	20	18	87,98	20	38	47,50
2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	0	100	0	0	100	25,00	25,00

2	16	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	12	Unit	0	3	0	0	3	3	25,00
2	16	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	40	Unit	0	10	0	0	10	10	25,00
2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	0	100	0	98,20	100	50,00	50,00
2	16	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	Laporan	0	12	12	98,22	12	24	50,00
2	16	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	Laporan	0	12	12	97,85	12	24	50,00
2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	0	100	0	68,06	100	33,24	33,24
2	16	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16	Unit	0	4	3	71,04	4	7	43,75
2	16	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	52	Unit	0	0	0	0	13	13	25,00
2	16	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	232	Unit	0	58	33	57,72	58	91	39,22

2	16	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	Unit	0	0	0	0	1	1	25,00
2	16	02			Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Terlaksananya Diseminasi Informasi kepada masyarakat	100	Persen	0	100	0	99,56	100	28,57	28,57
2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase informasi dan komunikasi publik pemerintah yang disampaikan kepada masyarakat	100	Persen	0	100	0	99,56	100	28,57	28,57
2	16	02	2.01	0002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	4	Dokumen	0	1	0	0	1	1	25,00
2	16	02	2.01	0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	4	Dokumen	0	1	0	0	1	1	25,00
2	16	02	2.01	0006	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	4	Dokumen	0	1	0	0	1	1	25,00
2	16	02	2.01	0007	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	20	Layanan	0	5	5	99,69	5	10	50,00
2	16	02	2.01	0008	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	4	Dokumen	0	1	0	0	1	1	25,00
2	16	02	2.01	0010	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	180	Orang	0	45	0	0	45	45	25,00

2	16	02	2.01	0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	4	Dokumen	0	1	0	0	1	1	25,00
2	16	03			Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase terpenuhinya layanan Infrastruktur dan Aplikasi Informatika	100	Persen	0	100	0	93,86	100	38,89	38,89
2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase domain jaring komunikasi yang dikelola	100	Persen	0	100	0	97,01	100	50,00	50,00
2	16	03	2.01	0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	176	Unit	0	44	44	97,01	44	88	50,00
2	16	03	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan e-government yang dikelola	100	Persen	0	100	0	52,75	100	27,78	27,78
2	16	03	2.02	0001	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E -Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4	Dokumen	0	1	0	0	1	1	25,00
2	16	03	2.02	0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	4	Unit	0	1	0	0	1	1	25,00
2	16	03	2.02	0006	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	176	Perangkat Daerah	0	44	0	0	44	44	25,00

2	16	03	2.02	0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	12	Unit	0	3	2	64,21	3	5	41,67
2	16	03	2.02	0009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	4	Dokumen	0	1	0	0	1	1	25,00
2	16	03	2.02	0012	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	4	Dokumen	0	1	0	0	1	1	25,00
2	20				Urusan Pemerintahan Bidang Statistik							0			25,00
2	20	02			Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase terpenuhinya database statistik sektoral daerah	100	Persen	0	100	0	0	100	25,00	25,00
2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kota	100	Persen	0	100	0	0	100	25,00	25,00
2	20	02	2.01	0002	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	272	Orang	0	68	0	0	68	68	25,00
2	20	02	2.01	0004	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	136	Orang	0	34	0	0	34	34	25,00
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN							0			25,00
2	21	02			Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	100	Persen	0	100	0	0	100	25,00	25,00

2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan persandian dan pengamanan informasi yang terlaksana	100	Persen	0	100	0	0	100	25,00	25,00
2	21	02	2.01	0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	4	Laporan	0	1	0	0	1	1	25,00
2	21	02	2.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jaring komunikasi sandi daerah yang dilaksanakan	100	Persen	0	100	0	0	100	25,00	25,00
2	21	02	2.02	0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	176	Perangkat Daerah	0	44	0	0	44	44	25,00

2.1.1.1. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
 Ada 26 (dua puluh enam) sub kegiatan pada 11 (sebelas) kegiatan di dalam 5 (lima) program yang belum memenuhi target Renja dan Renstra Diskominfo yang bisa dilihat pada Tabel 2.1.1.

Tabel 2.1.1 Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang Tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Faktor Penyebab
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kebijakan rasionalisasi Anggaran
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Realisasi 1 bulan terakhir (Desember) dilakukan pada tahun 2024
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kebijakan rasionalisasi Anggaran
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Anggaran (SPD) yang diberikan tidak mencukupi
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kebijakan rasionalisasi Anggaran
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kebijakan rasionalisasi Anggaran
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Anggaran (SPD) yang diberikan tidak mencukupi
			Pemeliharaan Mebel	Kebijakan rasionalisasi Anggaran
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Anggaran (SPD) yang diberikan tidak mencukupi
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kebijakan rasionalisasi Anggaran
2	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Kebijakan rasionalisasi Anggaran
			Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Kebijakan rasionalisasi Anggaran

			Pelayanan Informasi Publik	Kebijakan rasionalisasi Anggaran
			Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Kebijakan rasionalisasi Anggaran
			Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Kebijakan rasionalisasi Anggaran
			Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Kebijakan rasionalisasi Anggaran
3	Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kebijakan rasionalisasi Anggaran
			Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Kebijakan rasionalisasi Anggaran
			Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Kebijakan rasionalisasi Anggaran
			Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Anggaran (SPD) yang diberikan tidak mencukupi
			Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Kebijakan rasionalisasi Anggaran
			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Kebijakan rasionalisasi Anggaran
4	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Kebijakan rasionalisasi Anggaran
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Kebijakan rasionalisasi Anggaran
5	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kebijakan rasionalisasi Anggaran
		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kebijakan rasionalisasi Anggaran

- 2.1.2. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
- Ada 7 (tujuh) sub kegiatan pada 5 (lima) kegiatan di dalam 3 (tiga) program yang telah memenuhi target Renja dan Renstra Diskominfotik yang bisa dilihat pada Tabel 2.1.2.

Tabel 2.1.2 Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang Telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Layanan Hubungan Media
3	Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

- 2.1.3. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
- Tidak terdapat sub kegiatan, kegiatan dan program yang melebihi target Renja dan Renstra Diskominfotik.
- 2.1.4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Secara keseluruhan implikasi atau dampak yang timbul dari tidak tercapainya target pelaksanaan pada program/kegiatan/sub kegiatan pada Diskominfotik adalah tidak maksimalnya

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Diskominfo pada Bidang Teknologi, Informatika dan Komunikasi (TIK), pada Bidang Statistik Sektoral dan Persandian sesuai dengan perencanaan yang telah dilakukan serta tidak maksimalnya pencapaian target program, kegiatan dan sub kegiatan yang sudah ditetapkan pada Renstra dan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Diskominfo tahun 2023-2026.

2.1.5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil dan digunakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang akan dilakukan Diskominfo Kota Banda Aceh

- a. Melakukan pembinaan dan update data sektoral Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam konsolidasi forum data dan pengelolaan data sektoral;
- b. Penyediaan fasilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang berkualitas;
- c. Pengembangan kapasitas SDM TIK dan data sektoral;
- d. Melakukan pengembangan sarana dan prasarana sistem informasi dan komunikasi;
- e. Memperbaiki tingkat kesadaran terkait dengan isu keamanan data dan informasi;
- f. Mengalokasikan anggaran kepada program, kegiatan dan sub kegiatan yang sangat prioritas dengan merujuk kepada rencana kinerja dan hasil yang akan didapat, dan

Menyusun perencanaan kinerja Diskominfo yang lebih matang dan terpadu yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang dihadapi;

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Diskominfo

Capaian kinerja pelayanan Diskominfo Kota Banda Aceh dapat dihitung berdasarkan capaian target kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Diskominfo yang telah tertuang dalam Renstra Diskominfo, yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Statistik dan urusan pemerintahan bidang Persandian dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja, percepatan menuju *good governance*, *clean government*, dan pelayanan publik yang prima di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.

Untuk mendukung capaian tersebut Diskominfo Kota Banda Aceh merujuk pada delapan indikator tingkat kinerja pelayanan yang harus diraih. Indikator pertama yaitu Persentase data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh terupdate dan tepat waktu ditahun 2025 ditargetkan mencapai 31%, dimana capaian target kinerja pada tahun 2023 sesuai dengan target yang tercantum pada Renstra Diskominfo yaitu 27%. Indikator kedua yaitu Persentase website OPD yang aktif ditahun 2025 ditargetkan mencapai 86%, dimana capaian target kinerja pada tahun 2023 sesuai dengan target yang tercantum pada Renstra Diskominfo yaitu 82%. Indikator ketiga yaitu Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan ditahun 2025 ditargetkan mencapai 61%, dimana capaian target kinerja pada tahun 2023 sesuai dengan target yang tercantum pada Renstra Diskominfo yaitu 57%. Indikator keempat yaitu Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan ditahun 2025 ditargetkan mencapai 100%, indikator kelima yaitu Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi pada Tahun 2025 ditargetkan mencapai status “Ada”, indikator keenam yaitu Buku “Kabupaten dalam Angka” ditahun 2025 ditargetkan mencapai status “Ada”, indikator ketujuh yaitu Buku “PDRB” ditargetkan mencapai status “Ada” dan indikator terakhir atau kedelapan yaitu Persentase Perangkat daerah yang Telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah pada Tahun 2025 ditargetkan mencapai 40% dari total jumlah OPD. Hal yang harus diperhatikan adalah capaian indikator keempat sampai dengan

indikator kedelapan pada tahun 2023 adalah Tidak Tercapai. Hal ini disebabkan oleh indikator-indikator ini tidak dapat dilakukan oleh Diskominfo karena adanya kebijakan rasionalisasi anggaran sehingga Diskominfo harus melakukan prioritas anggaran kepada pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) Diskominfo yang ada pada Indikator pertama sampai dengan ketiga.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Diskominfo Kota Banda Aceh secara rinci dapat dilihat lebih detail pada Tabel 2.2..

TABEL 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Kota Banda Aceh

NO	INDIKATOR	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA DISKOMINFOTIK				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh terupdate dan tepat waktu			27%	29%	31%	33%	27%	-	31%	33%	Tercapai
2	Persentase website OPD yang aktif			82%	84%	86%	88%	82%	-	86%	88%	Tercapai
3	Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan			57%	59%	61%	63%	57%	-	61%	63%	Tercapai
4	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan			100%	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	Tidak dapat dilakukan karena adanya kebijakan rasionalisasi anggaran
5	Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi			Ada	Ada	Ada	Ada	-	-	Ada	Ada	Tidak dapat dilakukan karena adanya kebijakan rasionalisasi anggaran
6	Buku "Kabupaten dalam Angka"			Ada	Ada	Ada	Ada	-	-	Ada	Ada	Tidak dapat dilakukan karena adanya kebijakan rasionalisasi anggaran

7	Buku "PDRB"			Ada	Ada	Ada	Ada	-	-	Ada	Ada	Tidak dapat dilakukan karena adanya kebijakan rasionalisasi anggaran
8	Persentase Perangkat daerah yang Telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah			32%	36%	40%	44%	-	-	40%	44%	Tidak dapat dilakukan karena adanya kebijakan rasionalisasi anggaran

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Diskominfo

2.3.1. Tingkat Kinerja Pelayanan Diskominfo

Sebagai perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Statistik dan urusan pemerintahan bidang Persandian pada Pemerintah Kota Banda Aceh, Diskominfo telah menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan kerja yang tertuang pada Rencana Strategis (Renstra) yang memuat tugas pokok dan fungsi serta upaya pencapaian tujuan, sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kota Banda Aceh tahun 2023-2026. Dalam RPD tersebut, Diskominfo mendukung pencapaian tujuan RPD Pemerintah Kota Banda Aceh yaitu “Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah” dengan Sasaran “Optimalnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah”. Dalam mendukung capaian misi tersebut Diskominfo Kota Banda Aceh merujuk pada 8 (delapan) indikator tingkat kinerja pelayanan yang harus diraih. Dari 8 indikator pencapaian kinerja pelayanan Diskominfo seperti yang bisa dilihat pada Tabel 2.2, realisasi capaian 8 indikator pada tahun 2023 terdapat 3 indikator yang mencapai target yang telah ditetapkan, dimana 3 indikator ini merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Diskominfo Kota Banda Aceh. Persentase capaian realisasi target kinerja indikator pertama yaitu Persentase data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh terupdate dan tepat waktu dihitung dengan formula $\frac{\text{Jumlah data set yang tersedia}}{\text{Jumlah data set yang diharapkan}} \times 100\%$ dan melihat kepada capaian atau realisasi kinerja pada tahun 2023 yang dibagi dengan target yang sudah ditetapkan, indikator kinerja ini sudah mencapai target realisasi kinerja yang diharapkan yaitu 27%. Persentase capaian realisasi target kinerja indikator kedua yaitu Persentase Website OPD yang Aktif sudah mencapai target yang telah ditetapkan pada Tahun 2023 yaitu sebesar 82%, dimana angka realisasi pencapaian dari Website OPD yang Aktif adalah sebesar 82% dari semua website OPD yang ada di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh dimana angka

dan data ini diperoleh dengan perhitungan formula $\frac{\text{Jumlah website SKPD yang update dalam satu tahun}}{\text{Jumlah seluruh website SKPD}} \times 100\%$. Persentase capaian realisasi target kinerja indikator ketiga yaitu Persentase Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan sudah mencapai target yang telah ditetapkan pada Tahun 2023 yaitu sebesar 57% dimana angka realisasi pencapaian Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan adalah sebesar 57% dimana angka ini diperoleh dengan perhitungan formula $\frac{\text{Jumlah SKPD yang memiliki aplikasi}}{\text{Jumlah seluruh SKPD}} \times 100\%$. Namun terdapat 5 indikator yang tidak tercapai target yang telah ditetapkan dikarenakan beberapa hal seperti tidak adanya anggaran untuk pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung ketercapaian target indikator kinerja pelayanan, pengalihan prioritas Diskominfo untuk menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi yang dihadapi serta kurangnya sarana dan prasarana di dalam mencapai target indikator pelayanan tersebut.

2.3.2. Permasalahan dan Hambatan

Untuk mencapai target indikator sebagaimana disebutkan sebelumnya ada beberapa permasalahan dan hambatan yang mungkin timbul diantaranya yaitu :

1. Belum memadainya fasilitas desiminasi (penyebarluasan) informasi publik;
2. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas sesuai dengan bidang yang ada;
3. Sarana dan prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) belum memadai.
4. Belum tersedianya sarana dan prasarana TIK terpadu, dan
5. Masih rendahnya kesadaran keamanan data dan informasi yang dimiliki
6. Pengalihan prioritas Diskominfo untuk menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi yang dihadapi dimana terdapat kebijakan rasionalisasi anggaran yang diberikan

2.3.3. Dampaknya terhadap pencapaian prioritas pembangunan, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*)

Permasalahan dan hambatan di atas tentunya akan berdampak pada terhambatnya pencapaian Tujuan dan Sasaran RPD Pemerintah Kota Banda Aceh terhadap kontribusinya pada capaian program nasional seperti RPJMN (dimana Diskominfo berperan pada Transformasi Digital) dan SDGs. Khusus untuk SDGs, dari 17 tujuan (*goals*) yang ingin dicapai, dari ketiga permasalahan dan hambatan diatas diperkirakan akan berdampak pada tujuan ke-7 (Energi Bersih dan Terjangkau), ke-9 (Industri, Inovasi dan Infrastruktur), dan tujuan ke-11 (Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan).

2.3.4. Tantangan dan Peluang

Untuk meningkatkan pelayanan komunikasi, informasi dan statistik serta persandian sebagai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Diskominfo Kota Banda Aceh ada beberapa tantangan serta peluang yang harus dihadapi yaitu :

2.3.4.1. Tantangan

- a. Tidak konsistensinya penerapan regulasi;
- b. Terbitnya beberapa regulasi baru terkait Teknologi Informasi dan Komunikasi (seperti peraturan SPBE, Peraturan Satu Data, Peraturan Informasi Publik, SP4N-LAPOR!, dll);
- c. Belum adanya evaluasi rencana induk pengembangan TIK;
- d. Adanya tuntutan perencanaan bidang komunikasi, informatika dan statistik yang berkualitas;
- e. Adanya kekayaan potensi bidang komunikasi, informatika dan statistik yang belum tergarap secara maksimal;
- f. Belum maksimalnya pengelolaan keamanan data dan informasi yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh;
- g. Belum terpadunya pengelolaan arsitektur dan sarana prasarana TIK di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh, dan

- h. Belum maksimalnya pengelolaan informasi publik dan penyerapan aspirasi serta pengaduan masyarakat.

2.3.4.2. Peluang

- a. Adanya pembaharuan regulasi tentang pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik di bidang Informasi dan Teknologi, Komunikasi Publik, Statistik dan Persandian;
- b. Pesatnya kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- c. Keberadaan infrastruktur TIK Kota yang cukup memadai;

2.3.5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti

Berdasarkan tupoksi pelayanannya, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh dihadapkan pada beberapa isu penting, yaitu:

- a. Belum memadainya fasilitas Desiminasi (penyebarluasan) informasi publik;
- b. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data sektoral kota;
- c. Kurangnya SDM yang sesuai dengan bidang yang ada;
- d. Belum terpadunya pengelolaan sarana dan prasarana TIK, dan
- e. Masih rendahnya kesadaran keamanan data dan informasi yang dimiliki oleh OPD.

Formulasi di dalam menyikapi isu-isu di atas, Diskominfoitik Kota Banda Aceh akan menempuh beberapa hal diantaranya, yaitu:

- a. Melakukan pengembangan SDM terkait TIK dan data sektoral serta sosialisasi;
- b. Melakukan pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana TIK dan informasi publik serta data sektoral;
- c. Melakukan proses pengumpulan, verifikasi dan validasi data sektoral sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- d. Melakukan pemeliharaan sistem informasi dan komunikasi publik yang dimiliki;
- e. Perumusan dan penetapan kebijakan, rencana induk dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku, dan
- f. Melakukan perbaikan tata kelola keamanan dan jaring komunikasi sandi.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal (Ranwal) RKPD merupakan langkah awal ataupun dasar bagi setiap Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah. Dalam rancangan awal RKPD tercantum program, kegiatan dan sub kegiatan yang dijadikan sebagai pedoman perencanaan pembangunan daerah dengan menyesuaikan antara program pembangunan dari Pemerintah Kota dengan analisis gambaran umum kondisi daerah serta kebutuhan masyarakat sehingga akan menghasilkan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas untuk dijadikan rencana pembangunan kota.

Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Diskominfo Kota Banda Aceh perlu dilakukan sinkronisasi dengan Ranwal RKPD dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Banda Aceh tahun 2023-2026. Setelah dilakukan sinkronisasi dengan Ranwal RKPD dan RPD terdapat beberapa penyesuaian pada dokumen Renja dan juga dikarenakan adanya kegiatan pemutakhiran sub kegiatan pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) berdasarkan arahan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Banda Aceh dan juga Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hal ini menyebabkan adanya perubahan dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang sebelumnya digunakan dan mengakibatkan adanya penghapusan, pergantian maupun penambahan sub kegiatan baru pada Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan oleh Diskominfo pada tahun anggaran 2025.

Kebutuhan dana pada Renja berbeda dengan Pagu Indikatif yang ada pada Ranwal RKPD dimana hal ini disebabkan oleh adanya penyesuaian anggaran yang diajukan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan prioritasasi, menyesuaikan dengan proyeksi pagu anggaran yang diberikan dan memaksimalkan pencapaian target kinerja Diskominfo.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025 bisa dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025
Kota Banda Aceh

Nama OPD : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana	Catat an Penti ng	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah	100%	8.435.945.852	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Banda Aceh, Baiturrahm an, Kampung Baru	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah	100%		7.862.201.197		
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	100%	0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Banda Aceh, Baiturrahm an, Kampung Baru	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	100%		48.734.800		
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	dokumen	-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Banda Aceh, Baiturrahm an, Kampung Baru	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12	dokumen	48.734.800	-
4	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	6.950.463.265	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Banda Aceh, Baiturrahm an, Kampung Baru	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%		4.287.838.893		

5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33	Orang/Bulan	4.855.653.265	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30	Orang/Bulan	4.287.838.893	-
6	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	2.094.810.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	-	-
7	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%		80.300.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%		31.900.000	
8	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	60	Paket	80.300.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	58	Paket	31.900.000	-
9	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%		242.714.206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%		315.758.404	
10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6	Paket	5.861.356	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	5.855.000	-
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7	Paket	15.495.747	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	Paket	38.108.000	-

1 2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20	Laporan	221.357.103	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket	12.628.000	-
1 3							Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	dokumen	1.080.000	-
1 4							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20	Laporan	258.087.404	-
1 5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%		103.130.890	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%		332.496.000	
1 6	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3	Unit	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3	Unit	-	-
1 7							Pengadaan Mebel	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	18	Unit	24.852.000	-
1 8	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10	Unit	103.130.890	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10	Unit	307.644.000	-

19	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		750.534.443	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		2.597.490.500	
20	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	698.609.113	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	972.038.000	
21	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	51.925.330	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	1.625.452.500	-
22	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		308.803.048	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		247.982.600	
23							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	112.176.000	-
24	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4	Unit	90.487.100	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4	Unit	77.842.600	-

25	Pemeliharaan Mebel	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Jumlah Mebel yang Dipelihara	13	Unit	30.189.000	Pemeliharaan Mebel	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Jumlah Mebel yang Dipelihara	13	Unit	-	
26	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	58	Unit	158.126.948	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	58	Unit	57.964.000	-
27	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	30.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	-	
28	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Persentase Terlaksananya Diseminasi Informasi kepada masyarakat	100%		924.095.502	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Persentase Terlaksananya Diseminasi Informasi kepada masyarakat	100%		2.021.329.200	
29	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Persentase informasi dan komunikasi publik pemerintah yang disampaikan kepada masyarakat	100%		924.095.502	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Persentase informasi dan komunikasi publik pemerintah yang disampaikan kepada masyarakat	100%		2.021.329.200	
30	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	1	Dokumen	55.888.307	Relasi Media	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	5	Laporan	1.467.500.000	-

3 1	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1	Dokumen	58.371.382	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	1	Komunitas	292.234.000	-
3 2	Pelayanan Informasi Publik	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1	Dokumen	60.000.000	Pelayanan Informasi Publik	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	1	Permohonan	26.680.000	-
3 3	Layanan Hubungan Media	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Jumlah Layanan Hubungan Media	5	Layanan	688.899.913	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	1	Rekomendasi	22.115.000	-
3 4	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	1	Dokumen	30.935.900	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	1	Media	134.332.200	-
3 5	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	45	Orang	15.000.000	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	1	dokumen	27.844.000	-

36	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	1	Dokumen	15.000.000	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	45	Orang	50.624.000	-
37	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Persentase terpenuhinya layanan Infrastruktur dan Aplikasi Informatika	100%		457.199.912	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Persentase terpenuhinya layanan Infrastruktur dan Aplikasi Informatika	100%		1.013.956.000	
38	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Persentase domain jaring komunikasi yang dikelola	100%		153.115.626	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Persentase layanan e-government yang dikelola	100%		1.013.956.000	
39	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	44	Unit	153.115.626	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	1	Laporan	100.250.000	-
40	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Persentase layanan e-government yang dikelola	100%		304.084.286	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	1	Dokumen	178.150.000	-

4 1	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E - Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	Dokumen	76.204.000	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	1	Dokumen	-	
4 2	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1	Unit	38.150.919	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	3	Aplikasi	217.850.000	-
4 3	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	44	Perangkat Daerah	46.742.000	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	44	Perangkat Daerah	252.460.000	-
4 4	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	3	Unit	42.987.367	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas	1	Program	71.309.000	-
4 5	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	1	Dokumen	100.000.000	Koordinasi dan Fasilitas Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Jumlah dokumen koordinasi Fasilitas Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	1	dokumen	193.937.000	-

46	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	1	Dokumen	-							
47	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Persentase terpenuhinya database statistik sektoral daerah	100%		100.000.000	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Persentase terpenuhinya database statistik sektoral daerah	100%		191.367.000	
48	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kota	100%		100.000.000	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kota	100%		191.367.000	
49	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	68	Orang	-	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	34	Orang	-	-
50	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	34	Orang	100.000.000	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	68	Persentase	191.367.000	-
51	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Persentase Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	100%		7.076.730	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Persentase Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	100%		405.657.000	

5 2	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Persentase kegiatan persandian dan pengamanan informasi yang terlaksana	100%		7.076.730	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Persentase kegiatan persandian dan pengamanan informasi yang terlaksana	100%		405.657.000	
5 3	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1	Laporan	7.076.730	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1	Laporan	405.657.000	
5 4	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Persentase jaring komunikasi sandi daerah yang dilaksanakan	100%		-	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Persentase jaring komunikasi sandi daerah yang dilaksanakan	100%		-	
5 5	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	44	Perangkat Daerah	-	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	44	Perangkat Daerah	-	-
TOTAL BELANJA						9.924.317.996						11.494.510.397	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Melalui pelaksanaan program Pokok-Pokok Pikiran (POKIR) yang diterima oleh Diskominfo dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh akan diperoleh berbagai usulan aspirasi kebutuhan masyarakat Kota Banda Aceh yang akan disesuaikan dengan program rencana pembangunan Kota Banda Aceh pada Tahun 2025 sesuai dengan RPD Kota Banda Aceh tahun 2023-2026. Melalui pelaksanaan program POKIR ini akan diketahui apa yang menjadi kebutuhan langsung masyarakat yang disampaikan melalui anggota DPRK Banda Aceh.

Pelaksanaan POKIR ini akan dilaksanakan oleh Diskominfo Kota Banda Aceh yang selalu berkoordinasi dengan Bappeda Kota Banda Aceh dimana Diskominfo akan membuka beberapa slot kegiatan yang bisa diakses, diterima dan diusulkan oleh anggota DPRK Kota Banda Aceh melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang dikelola oleh Bappeda dan Diskominfo sebagai operator. Usulan kegiatan tersebut harus sesuai dengan isu-isu penting yang saat ini terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan Kota Banda Aceh dan juga sesuai dengan tupoksi dari Diskominfo yang bertanggung jawab di dalam bidang Teknologi, Informatika dan Komunikasi, Statistik dan Persandian.

Diskominfo juga ikut serta di dalam melaksanakan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang bertujuan untuk menyerap aspirasi dan kebutuhan masyarakat Kota Banda Aceh. Namun pada tahun 2025 Diskominfo tidak membuka dan menerima usulan terkait dengan Musrenbang.

Usulan Anggota DPRK Kota Banda Aceh atau POKIR dan usulan Musrenbang yang sudah diverifikasi dan divalidasi oleh Diskominfo Kota Banda Aceh dapat dilihat pada Tabel 2.4.

TABEL 2.4.
USULAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025
KOTA BANDA ACEH

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DISKOMINFOTIK

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfo) Kota Banda Aceh (Diskominfo) di dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) ikut serta dalam pencapaian pelaksanaan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 yang merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 karena akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Oleh karena itu Diskominfo mengambil peran di dalam agenda pembangunan sebagai prioritas nasional yaitu Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar dimana prioritas nasional ini diterjemahkan menjadi prioritas daerah yaitu Transformasi Tata Kelola Penguatan Kemandirian Ekonomi melalui Peningkatan Investasi, Perdagangan Jasa, Pariwisata serta Perikanan.

Diskominfo Kota Banda Aceh sesuai dengan RPJMN tahun 2020-2024 berfokus kepada Transformasi Digital dimana terdapat sasaran meningkatnya pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi dengan indikator jangkauan infrastruktur jaringan tetap pitalebar (fixed broadband) (% total kecamatan) dimana baseline tahun 2019 adalah 35.71 dan target pada tahun 2024 adalah 60, indikator Jangkauan infrastruktur jaringan bergerak pitalebar (mobile broadband) (% desa) dimana baseline tahun 2019 adalah 87.4 dan target pada tahun 2024 adalah 95, indikator populasi yang terlayani penyiaran digital (%) dimana baseline tahun 2019 adalah 52.28 dan target 80.

Beberapa pencapaian kinerja Diskominfo terlihat pada pencapaian indeks e-government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kota Banda Aceh yang harus sesuai dengan dokumen RPJMN 2020-2024 sektor kementerian komunikasi dan informatika dimana nilai indeks e-government atau pemerintahan elektronik nasional dimulai dengan nilai 2,8 ditahun 2015, 2,9 ditahun 2016, 3,0 ditahun 2017, dan 3,2 ditahun 2018, serta 3,4 ditahun 2019.

Disamping itu Diskominfo juga terus berupaya untuk meningkatkan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) dimana pada tahun 2023 Diskominfo berhasil meraih nilai akuntabilitas kinerja 75.15 dengan predikat BB, dimana pada tahun 2022 Diskominfo berhasil meraih nilai akuntabilitas kinerja 86.55 dengan predikat A, dimana pada tahun 2021 meraih nilai akuntabilitas kinerja 87.60 dengan predikat A dan pada tahun 2020 meraih nilai akuntabilitas kinerja 80.22 dengan predikat A.

Diskominfo Kota Banda Aceh terus berupaya untuk meningkatkan indeks pemerintahan elektronik (e-government) dari tahun ke tahun, terus berupaya untuk meningkatkan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat, pelayanan informasi publik kepada masyarakat luas dan stakeholder yang membutuhkannya serta meningkatkan pencapaian Nilai SAKIP yang akan mendorong pencapaian Nilai SAKIP Pemko Banda Aceh.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Diskominfo

Perumusan tujuan dan sasaran adalah merupakan tahap penting dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) dimana tujuan dan sasaran merupakan gambaran arah pembangunan atau kondisi yang diinginkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan. Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Kota Banda Aceh melalui Renja Tahun 2025 merumuskan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

1. Tujuan

Tujuan Strategik merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 tahun ke depan. Dengan diformulasikan tujuan strategik ini maka Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh dapat

dengan tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi tuntutan visinya. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Dengan adanya penetapan tujuan akan dapat diletakkan kerangka prioritas untuk menentukan arah, guna pencapaian keberhasilan sebagai motivator dan pendorong bagi kinerja yang memuaskan dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Adapun yang menjadi tujuan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh adalah tersedianya data dan Informasi yang berkualitas dan terintegrasi dalam Kota Banda Aceh.

2. Sasaran

Sasaran merupakan target yang ingin dicapai di masa yang akan datang dengan suatu tujuan yang jelas yang dilandasi dengan visi dan misi yang jelas. Adapun yang menjadi sasaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut :

- Tersedianya data statistik Sektoral yang berkualitas dan terintegrasi;
- Meningkatnya kualitas tata kelola teknologi informasi dan pengelolaan informasi publik.

Secara ringkas tujuan dan sasaran rencana kerja Diskominfotik bisa dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja Diskominfotik Tahun 2025

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN		TARGET KINERJA
1	2		3
Tujuan : 1. Tersedianya data dan Informasi yang berkualitas dan terintegrasi dalam kota banda aceh	Persentase data dan informasi Kota Banda Aceh yang berkualitas dan terintegrasi		100%
Sasaran : 1.1 Tersedianya data statistik Sektoral yang berkualitas dan terintegrasi 1.2 Meningkatnya kualitas tata kelola teknologi informasi dan pengelolaan Informasi Publik	1.1.1	Persentase data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh terupdate dan tepat waktu	31%
	1.1.2	Persentase website OPD yang aktif	86%
	1.1.3	Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan	61%

3.3. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Implementasi perencanaan pada penjabarannya dilakukan dengan prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Prioritas program dan kegiatan tersebut menjadi pedoman pelaksanaan fungsi Perangkat Daerah dalam merealisasikan perencanaan pembangunan.

Kegiatan adalah bagian dari atau mengacu kepada program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Renja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Sub Kegiatan merupakan bentuk dari implementasi atau aktivitas kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya dan mengacu kepada program sesuai dengan peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

1) Faktor-faktor yang Menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang dalam Renja Tahun 2025 dan akan dilaksanakan oleh Diskominfo Kota Banda Aceh tentunya telah sesuai dan mendukung beberapa faktor seperti berikut :

- Mendukung pencapaian pelaksanaan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024
- Mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026 yang tertuang dalam RPD Kota Banda Aceh;

- Mendukung tujuan SDGs, dari 17 tujuan (*goals*) yang ingin dicapai, terdapat 3 kesesuaian yakni tujuan ke-7 (*affordable and clean energy*), ke-9 (*industry, innovation and infrastructure*) dan tujuan ke-11 (*sustainable cities and communities*);
- Meningkatkan Indeks Pencapaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Banda Aceh;
- Meningkatkan Indeks Nilai SAKIP Diskominfo;
- Mendukung Kota Banda Aceh sebagai salah satu kota dengan konsep pelayanan *Smart City*, dan
- Meningkatkan indeks pembangunan statistik sektoral Kota Banda Aceh.

2) Uraian Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Diskominfo Kota Banda Aceh memiliki tupoksi di dalam pencapaian kinerja di bidang Teknologi, Informatika dan Komunikasi (TIK), statistik dan persandian yang tentunya disesuaikan dengan dinamika perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dan harus ditopang oleh data statistik yang berkualitas dan berkesinambungan. Untuk melaksanakan tupoksi tersebut ditetapkanlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang sesuai.

Penyebaran lokasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Diskominfo untuk tahun 2025 lebih banyak dilakukan di Gampong Kampung Baru, Kecamatan Baiturrahman dibandingkan dengan delapan kecamatan lainnya di Kota Banda Aceh dengan total 5 program, 12 Kegiatan dan 35 sub kegiatan. Hal ini disebabkan karena mayoritas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan dilaksanakan di kantor Diskominfo Kota Banda Aceh yang berlokasi di Kecamatan Baiturrahman. Jumlah anggaran yang direncanakan berbeda dengan pagu anggaran pada Rancangan Awal RKPD dimana hal ini disebabkan oleh kegiatan pemutakhiran pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) berdasarkan arahan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Banda Aceh dan juga Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hal ini menyebabkan adanya

perubahan dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang sebelumnya digunakan dan mengakibatkan adanya penghapusan, pergantian maupun penambahan sub kegiatan baru pada Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan oleh Diskominfo pada tahun anggaran 2025 dengan rencana total jumlah pagu indikatif 2025 mencapai Rp 11.494.510.397,-

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Diskominfo Kota Banda Aceh yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 serta prakiraan maju tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2025
dan Perkiraan Maju Tahun 2026
Kota Banda Aceh

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5		6	7	8	9		10
					Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik										
2					Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar										
2	16				Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika										
2	16	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	100	%	7.862.201.197		-	100	%	8.435.945.852
2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	100	%	48.734.800		-	100	%	-
2	16	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	12	Dokumen	48.734.800	PAD	-	0	Dokumen	-
2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	100	%	4.287.838.893		-	100	%	6.950.463.265

2	16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	30	Orang/Bulan	4.287.838.893	DAU	-	33	Orang/Bulan	4.855.653.265
2	16	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	-	-	-	DAU	-	12	Dokumen	2.094.810.000
2	16	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	100	%	31.900.000			100	%	201.657.103
2	16	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	58	Paket	31.900.000	PAD	-	60	Paket	201.657.103
2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	100	%	315.758.404		-	100	%	121.357.103
2	16	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	1	Paket	5.855.000	PAD	-	6	Paket	5.861.356
2	16	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	5	Paket	38.108.000	PAD	-	1	Paket	-
2	16	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	2	Paket	12.628.000	PAD	-	7	Paket	15.495.747
2	16	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	1	Dokumen	1.080.000	PAD	-	1	Dokumen	-
2	16	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	20	Laporan	258.087.404	PAD	-	20	Laporan	100.000.000

2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	100	%	332.496.000		-	100	%	133.319.890
2	16	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	3	Unit	-	PAD	-	3	Unit	-
2	16	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	18	Unit	24.852.000	PAD	-	13	Unit	-
2	16	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	10	Unit	307.644.000	PAD	-	10	Unit	133.319.890
2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	100	%	2.597.490.500		-	100	%	750.534.443
2	16	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	12	Laporan	972.038.000	PAD	-	12	Laporan	698.609.113
2	16	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	12	Laporan	1.625.452.500	PAD	-	12	Laporan	51.925.330
2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	100	%	247.982.600			100	%	278.614.048
2	16	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	1	Unit	112.176.000	PAD	-	1	Unit	30.000.000

2	16	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	4	Unit	77.842.600	PAD	-	4	Unit	60.487.100
2	16	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	13	Unit	-	PAD	-	13	Unit	-
2	16	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	58	Unit	57.964.000	PAD	-	58	Unit	158.126.948
2	16	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	1	Unit	-	PAD	-	1	Unit	30.000.000
2	16	02			Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Terlaksananya Diseminasi Informasi kepada masyarakat	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	100	Persen	2.021.329.200		-	100	Persen	965.933.480
2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase informasi dan komunikasi publik pemerintah yang disampaikan kepada masyarakat	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	100	Persen	2.021.329.200		-	100	Persen	965.933.480
2	16	02	2.01	0014	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	5	Laporan	1.467.500.000	PAD	-	5	Laporan	690.737.891
2	16	02	2.01	0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	1	Komunitas	292.234.000	PAD	-	1	Komunitas	30.935.900

2	16	02	2.01	0017	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	1	Permohonan	26.680.000	PAD	-	1	Permohonan	90.000.000
2	16	02	2.01	0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	1	Rekomendasi	22.115.000	PAD	-	1	Rekomendasi	55.888.307
2	16	02	2.01	0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	1	Media	134.332.200	PAD	-	1	Media	58.371.382
2	16	02	2.01	0022	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	1	Dokumen	27.844.000	PAD	-	1	Media	15.000.000
2	16	02	2.01	0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	45	Orang	50.624.000	PAD	-	45	Orang	25.000.000
2	16	03			Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase terpenuhinya layanan Infrastruktur dan Aplikasi Informatika	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	100	Persen	1.013.956.000		-	100	Persen	467.199.912
2	16	03	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan e-government yang dikelola	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	100	Persen	1.013.956.000		-	100	Persen	467.199.912
2	16	03	2.02	0015	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	1	Laporan	100.250.000	PAD	-	1	Dokumen	46.742.000
2	16	03	2.02	0017	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	1	Dokumen	178.150.000	PAD	-	1	Dokumen	38.150.919

2	16	03	2.02	0019	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	1	Dokumen	-	PAD	-	1	Dokumen	-
2	16	03	2.02	0020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	3	Aplikasi	217.850.000	PAD	-	3	Aplikasi	42.987.367
2	16	03	2.02	0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	44	Perangkat Daerah	252.460.000	PAD	-	1	Program	153.115.626
2	16	03	2.02	0027	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	1	Program	71.309.000	PAD	-	1	Dokumen	110.000.000
2	16	03	2.02	0028	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Jumlah dokumen koordinasi Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	1	dokumen	193.937.000	PAD	-	44	Perangkat Daerah	76.204.000
2	20				Urusan Pemerintahan Bidang Statistik										
2	20	02			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase terpenuhinya database statistik sektoral daerah	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	100	Persen	191.367.000		-	100	Persen	150.000.000
2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kota	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	100	Persen	191.367.000		-	100	Persen	150.000.000
2	20	02	2.01	0007	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	34	Orang	-	PAD	-	34	Orang	150.000.000

2	20	02	2.01	0008	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	68	Persentase	191.367.000	PAD	-	68	Persentase	-
2	21				Urusan Pemerintahan Bidang Persandian										
2	21	02			Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	100	Persen	405.657.000		-	100	Persen	7.076.730
2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan persandian dan pengamanan informasi yang terlaksana	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	100	Persen	405.657.000		-	100	Persen	7.076.730
2	21	02	2.01	0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	1	Laporan	405.657.000	PAD	-	1	Laporan	7.076.730
2	21	02	2.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jaring komunikasi sandi daerah yang dilaksanakan	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	100	Persen	-		-	100	Persen	-
2	21	02	2.02	0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	44	Perangkat Daerah	-	PAD	-	44	Perangkat Daerah	-
TOTAL										11.494.510.397					10.026.155.974

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DISKOMINFOTIK

Untuk mencapai tujuan strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfo) Kota Banda Aceh yakni tersedianya data dan informasi yang berkualitas dan terintegrasi di dalam Kota Banda Aceh diperlukan rangkaian strategi dan kebijakan. Untuk mewujudkan strategi dan kebijakan tersebut dibutuhkan program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Diskominfo Kota Banda Aceh dan sebagai upaya di dalam mengantisipasi berbagai permasalahan di Bidang Komunikasi, Informasi dan Statistik dan Persandian, maka disusunlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan kerja dengan mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang kemudian dilakukan kegiatan pemutakhiran pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) berdasarkan arahan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Banda Aceh dan juga Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Rencana Kerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pagu Indikatif Diskominfo Kota Banda Aceh Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Rencana Kerja, Pendanaan dan Kelompok Sasaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2025
Kota Banda Aceh

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan dan sub kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025					Kelompok Sasaran
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	
								Volume	Satuan			
1					2	3	4	5	6		7	8
					Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik					11.494.510.397		
2					Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar					11.494.510.397		
2	16				Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika					10.897.486.397		
2	16	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	100	%	7.862.201.197		
2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	100	%	48.734.800		
2	16	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	12	Dokumen	48.734.800	PAD	ASN Diskominfo
2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	100	%	4.287.838.893		
2	16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	30	Orang/Bulan	4.287.838.893	DAU	ASN Diskominfo

2	16	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	-	-	-	DAU	ASN Diskominfo
2	16	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	100	%	31.900.000		
2	16	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	58	Paket	31.900.000	PAD	ASN Diskominfo
2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	100	%	315.758.404		
2	16	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	1	Paket	5.855.000	PAD	ASN Diskominfo
2	16	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	5	Paket	38.108.000	PAD	ASN Diskominfo
2	16	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	2	Paket	12.628.000	PAD	ASN Diskominfo
2	16	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	1	Dokumen	1.080.000	PAD	ASN Diskominfo
2	16	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	20	Laporan	258.087.404	PAD	ASN Diskominfo
2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	100	%	332.496.000		

2	16	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	3	Unit	-	PAD	ASN Diskominfo
2	16	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	18	Unit	24.852.000	PAD	ASN Diskominfo
2	16	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	10	Unit	307.644.000	PAD	ASN Diskominfo
2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	100	%	2.597.490.500		
2	16	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	12	Laporan	972.038.000	PAD	ASN Diskominfo
2	16	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	12	Laporan	1.625.452.500	PAD	ASN Diskominfo
2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	100	%	247.982.600		
2	16	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	1	Unit	112.176.000	PAD	ASN Diskominfo
2	16	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	4	Unit	77.842.600	PAD	ASN Diskominfo
2	16	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	13	Unit	-	PAD	ASN Diskominfo

2	16	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	58	Unit	57.964.000	PAD	ASN Diskominfo
2	16	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	1	Unit	-	PAD	ASN Diskominfo
2	16	02			Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Terlaksananya Diseminasi Informasi kepada masyarakat	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	100	Persen	2.021.329.200		
2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase informasi dan komunikasi publik pemerintah yang disampaikan kepada masyarakat	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	100	Persen	2.021.329.200		
2	16	02	2.01	0014	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	5	Laporan	1.467.500.000	PAD	Masyarakat Kota Banda Aceh
2	16	02	2.01	0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	1	Komunitas	292.234.000	PAD	Masyarakat Kota Banda Aceh
2	16	02	2.01	0017	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	1	Permohonan	26.680.000	PAD	Masyarakat Kota Banda Aceh
2	16	02	2.01	0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	1	Rekomendasi	22.115.000	PAD	Masyarakat Kota Banda Aceh

2	16	02	2.01	0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	1	Media	134.332.200	PAD	Masyarakat Kota Banda Aceh
2	16	02	2.01	0022	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	1	Dokumen	27.844.000	PAD	Masyarakat Kota Banda Aceh
2	16	02	2.01	0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	45	Orang	50.624.000	PAD	Masyarakat Kota Banda Aceh
2	16	03			Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase terpenuhinya layanan Infrastruktur dan Aplikasi Informatika	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	100	Persen	1.013.956.000		
2	16	03	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan e-government yang dikelola	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	100	Persen	1.013.956.000		
2	16	03	2.02	0015	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	1	Laporan	100.250.000	PAD	Seluruh SKPD Kota Banda Aceh
2	16	03	2.02	0017	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	1	Dokumen	178.150.000	PAD	Seluruh SKPD Kota Banda Aceh
2	16	03	2.02	0019	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	1	Dokumen	-	PAD	Seluruh SKPD Kota Banda Aceh
2	16	03	2.02	0020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	3	Aplikasi	217.850.000	PAD	Seluruh SKPD Kota Banda Aceh

2	16	03	2.02	0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	44	Perangkat Daerah	252.460.000	PAD	Seluruh SKPD Kota Banda Aceh
2	16	03	2.02	0027	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	1	Program	71.309.000	PAD	Seluruh SKPD Kota Banda Aceh
2	16	03	2.02	0028	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Jumlah dokumen koordinasi Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	1	dokumen	193.937.000	PAD	Seluruh SKPD Kota Banda Aceh
2	20				Urusan Pemerintahan Bidang Statistik					191.367.000		
2	20	02			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase terpenuhinya database statistik sektoral daerah	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	100	Persen	191.367.000		
2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kota	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	100	Persen	191.367.000		
2	20	02	2.01	0007	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	34	Orang	-	PAD	Seluruh SKPD Kota Banda Aceh
2	20	02	2.01	0008	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	68	Persentase	191.367.000	PAD	Seluruh SKPD Kota Banda Aceh

2	21				Urusan Pemerintahan Bidang Persandian					405.657.000		
2	21	02			Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	100	Persen	405.657.000		
2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan persandian dan pengamanan informasi yang terlaksana	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	100	Persen	405.657.000		
2	21	02	2.01	0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	1	Laporan	405.657.000	PAD	Seluruh SKPD Kota Banda Aceh
2	21	02	2.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jaring komunikasi sandi daerah yang dilaksanakan	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	100	Persen	-		
2	21	02	2.02	0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baru	44	Perangkat Daerah	-	PAD	Seluruh SKPD Kota Banda Aceh

Terdapat penambahan sub kegiatan dan juga anggaran yang diberikan kepada Diskominfo Kota Banda Aceh pada Tahun 2025. Jumlah anggaran yang direncanakan berbeda dengan pagu anggaran pada Rancangan Awal RKPD dimana hal ini disebabkan oleh kegiatan pemutakhiran pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) berdasarkan arahan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Banda Aceh dan juga Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hal ini menyebabkan adanya penghapusan, pergantian maupun penambahan sub kegiatan baru pada Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan oleh Diskominfo pada tahun anggaran 2025 dengan rencana total jumlah pagu indikatif 2025 mencapai Rp 11.494.510.397,-. Jumlah anggaran ini sudah termasuk dengan adanya proses mutasi anggaran dari Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah ke Diskominfo dimulai dari tahun 2025 sebanyak Rp 1.122.500.000,-. Anggaran ini dimasukkan ke dalam program pengelolaan informasi dan komunikasi publik untuk dikelola oleh Bidang Pengelolaan Informasi Publik (PIP). Sementara itu sub kegiatan yang bertambah diantaranya adalah sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, pengadaan mebel, penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan. Sub kegiatan ini terdapat pada program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Sementara sub kegiatan yang terdapat pada program pengelolaan informasi dan komunikasi publik, program pengelolaan aplikasi informatika dan program penyelenggaraan statistik sektoral disesuaikan nama dan kode rekeningnya dan bisa dilihat pada Tabel 4.1.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) yang telah disusun ini merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh pada Tahun 2025. Dokumen Renja ini juga sebagai pedoman dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kota Banda Aceh periode Tahun 2023-2026 yang dituangkan ke dalam Rencana Strategis (Renstra) Diskominfo tahun 2023-2026. Penyusunan Renja ini bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mewujudkan sasaran strategis dan juga untuk mencapai tujuan sehingga misi dan visi Diskominfo Kota Banda Aceh yang telah ditetapkan dapat terwujud.

Renja menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan yang terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggungjawab pemerintah Kota Banda Aceh di dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat atau *Community Base Development (CBD)* dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku atau pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya merembes ke bawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Dokumen Renja Diskominfo Tahun 2025 ini diharapkan bisa menjelaskan arah pelayanan Diskominfo yang tertuang di dalam pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan atau kebutuhan anggaran yang telah disesuaikan dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Diskominfo tahun 2023-2026. Catatan penting yang harus diperhatikan adalah dalam beberapa tahun terakhir, lebih tepatnya semenjak tahun 2020, telah dilakukan tindakan *refocusing*

anggaran dan kebijakan Surat Penyediaan Dana (SPD) ketat yang sangat mempengaruhi keadaan keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh sehingga di dalam pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Diskominfofik nantinya akan dilakukan kebijakan prioritasasi agar didapatkan capaian kinerja yang lebih terukur.

Hal-hal penting lainnya yang diharapkan menjadi pertimbangan maupun tindak lanjut dalam pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tertuang di dalam Renja Diskominfofik Tahun 2025 ini adalah :

1. Menentukan skala prioritas dengan melakukan program, kegiatan dan sub kegiatan yang sifatnya penting dan pokok guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta meningkatkan kinerja Diskominfofik;
2. Optimalisasi pelaksanaan tugas dengan memberdayakan aparat serta sumber daya yang ada, dan
3. Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, elaborasi dan kerjasama baik internal maupun antar instansi di dalam lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh agar tercipta hubungan kerjasama yang sinergis dalam rangka mendukung pencapaian RPD Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026.

Demikianlah Dokumen Renja Diskominfofik Tahun 2025 ini kami susun dimana kami menyadari bahwa dokumen ini masih diperlukan adanya saran dan masukan dari berbagai pihak untuk tercapainya penyempurnaan perencanaan dimasa-masa yang akan datang.

Banda Aceh, 17 Juli 2024

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH**



Alizar, S.Ag.,M.Hum
Pembina Utama Muda /
NIP. 19691117 200112 1 002